

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pemberdayaan

###### a) Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing “*empowerment*”. Menurut Nani Machendrawaty dan Agus Ahmadi bahwa pemberdayaan secara leksikal berarti penguatan. Istilah pemberdayaan yaitu upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya.<sup>11</sup>

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya / kekuatan / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “*proses*” merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata

---

<sup>11</sup> Nani Machendrawaty, dan Agus Ahmadi Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 41-42

yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.<sup>12</sup>

Pemberdayaan memiliki arti mendekatkan masyarakat pada sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk menentukan kapasitasnya dalam menentukan masa depan mereka dan untuk berperan serta di dalamnya, juga memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya. Dalam pendekatan penguatan masyarakat melalui pemberdayaan, dimaksudkan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program atau bantuan, akan tetapi membuat masyarakat memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya<sup>13</sup>

Kadarisman menyatakan pemberdayaan adalah merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan yang diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pada prinsipnya pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang

---

<sup>12</sup> Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal.77

<sup>13</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*, (Bandung, UNPAD Press, 2016), hal. 104-105

menjadi modal dasar akulturasi diri. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Payne dan Shardlow mengenai tujuan dari pemberdayaan. Menurut Payne, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.<sup>14</sup>

Keberdayaan menurut Adjid adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya), maka dari itu pemberdayaan berarti usaha (program, proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri.<sup>15</sup>

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar

---

<sup>14</sup> M.Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi: Menuju Orientasi Pemberdayaan*, (Malang: UB Press, 2016), hal.145

<sup>15</sup> Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K.Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal.28-29

mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya. Dan world Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, idea atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk tindakan) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.<sup>16</sup>

Sejalan dengan itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpingkirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan- pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupan. Dalam pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti: 1.) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan. 2.) Perbaaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan). 3.) Kemerdekaan dari segala

---

<sup>16</sup> Theresia Aprillia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet . ke-1, hal. 117

bentuk penindasan. 4.) Terjamin keamanan. 5.) Terjamin hak asasi manusia yang bebas dari segala rasa takut dan kekhawatiran.<sup>17</sup>

Dengan demikian berarti pemberdayaan bukan hanya sekedar memberi kewenangan atau kekuasaan pada yang lemah saja, melainkan dalam pemberdayaan juga terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi yang dapat dikembangkan (enabling). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi

---

<sup>17</sup> Ibid.,hal.117

yang di milikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 2) Memperkuat potensi atau daya yang di miliki masyarakat (empowerment). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yag lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.<sup>18</sup>

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan,, untuk berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan dan atau menakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidup (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas).

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat

---

<sup>18</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. ke-3, hal. 28

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Pemberdayaan bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program atau bantuan, akan tetapi membuat masyarakat memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya.

#### b) Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antithesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak kepada rakyat mayoritas. Konsep pemberdayaan ini dibangun dari kerangka logis sebagai berikut: 1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi, 2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran, 3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat budaya dan tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus

dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).<sup>19</sup>

Menurut Ginanjar Kartasasmita proses pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga cara yaitu :<sup>20</sup>

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan

---

<sup>19</sup> Zulfa Ulin Nuha, *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 31-32

<sup>20</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*, (Bandung, UNPAD Press, 2016), hal. 67-68

masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar

- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari tujuh tahapan, diantaranya sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Persiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

---

<sup>21</sup> Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Baru, 2012), hal. 35-37

2. Tahap Assessment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
3. Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan. Pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dilakukan.
4. Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan ke pihak penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan peran dari masyarakat dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bias melenceng dengan data di lapangan.
6. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama fasilitator.

7. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi seharusnya dilakukan jika masyarakat sasaran sudah bias mandiri, bukan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

c) Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Untuk menilai keberhasilan program pemberdayaan, Sumodiningrat mengungkapkan indikator-indikator sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Jumlah penduduk miskin berkurang
2. Bermbangnya suatu usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatkan kemandirin yang ditandai dengan usaha produktif semakin berkembang, permodalan semakin kuat, sistem administrasi semakin rapi, serta semakin luasnya interaksi di dalam masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

## 2. Ekonomi Keluarga

### a) Pengertian Status Ekonomi Keluarga

---

<sup>22</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*, (Bandung, UNPAD Press, 2016), hal. 61

Secara bahasa ekonomi keluarga terdiri keluarga dari dua kata yaitu ekonomi dan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ekonomi merupakan tingkahlaku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor-yang mereka butuhkan. Adapun keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang jugamerupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orangtua mereka yang telah lanjut usia. Dalam bentuk yang paling sederhana, keluarga terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan ditambah dengan anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Bentuk keluarga yang demikian dalam antropologi dinamakan sebagai keluarga inti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya.<sup>23</sup>

Pengertian kalimat “status ekonomi keluarga” Status berarti keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, Negara) di masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan

---

<sup>23</sup> Pengertian Ekonomi Keluarga, <https://www.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluarga> diakses pada 8 April 2019

permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu, bapak dan anak-anaknya yang merupakan satuan kekerabatan paling mendasar dalam masyarakat.

Status sosial pada ekonomi keluarga dalam masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya. Dalam konteks ini Soerjono Soekanto mengutip keterangan Aris Toteles “Bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”.<sup>24</sup>

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia dianggap sama derajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial tidak demikian, perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Pada umumnya warga lapisan atas (*Upper-class*) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*Middle-class*) dan lapisan bawah (*Lower-class*).

#### b) Aspek-aspek Ekonomi Keluarga

Menurut penjelasan diatas, didalam bermasyarakat terdapat tiga lapisan ekonomi yang berbeda yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.

##### 1. Ekonomi Keluarga Mampu

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990), hal .251

Marx mengatakan “Selama masyarakat masih terbagi kedalam kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah yang akan terhimpun segala kekuasaan dan kekayaan. Ukuran atau kriteria yang bisa di pakai untuk menggolongkan anggota masyarakat kedalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan.<sup>25</sup>

Ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanahlah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah di anggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atasan masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari di namakan elit. Dan biasanya lapisan golongan atasan merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini, dan hal tersebut di anggap sebagai suatu hal yang wajar.<sup>26</sup>

## 2. Ekonomi Keluarga Sedang

Status ekonomi yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak berlebihan didalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan didalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

---

<sup>25</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu .....*hal. 263

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 264

Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status dibawahnya. Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan status diatasnya disebabkan status ini terlalu banyak dalam masyarakat. Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang membedakan adalah tingkat fasilitas yang digunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi yang diatasnya.

### 3. Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin), biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga pemukiman masyarakat yang tertinggal.

Ada sejumlah teori yang dikolaborasikan berkaitan dengan kemiskinan dan kelas sosial, ringkasnya teori tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu yang berfokus pada tingkah laku individu dan yang mengarah pada struktur sosial. Teori tingkah laku merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan kapital manusia. Pandangan strukturalis bertolak belakang dengan pendapat tersebut, dan diawali dengan baik oleh teori kelompok Marxis, yaitu “Bahwa hambatan- hambatan structural yang sistematis telah menciptakan

ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutan penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis”.<sup>27</sup>

Singkatnya teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan. Di sisi lain, teori struktur sosial menyatakan bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu, misalnya sikap individu yang tidak produktif merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan miskin.

#### c) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemberdayaan merupakan jalan terobosan yang akan mempercepat transformasi kegiatan sosial non-ekonomi menjadi suatu usaha ekonomi. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin dicapainya..<sup>28</sup>

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan

---

<sup>27</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hal. 135

<sup>28</sup>Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/edisi-20-tahun-2000/pemberdayaan-masyarakat-dalam-bidang-ekonomi---oleh-mardi-yatmo-hutomo/> diakses pada 8 April 2019

pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.<sup>29</sup>

### **3. Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera)**

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) serta dalam upaya untuk menumbuhkembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka pada periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur 2014-2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA). Jalin Matra ialah singkatan dari Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera. Program Jalin Matra merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya(wong cilik) berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan

---

<sup>29</sup> Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*,(Jakarta: Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002)

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015 dengan status kesejahteraan 30% terendah.<sup>30</sup>

Dasar Hukum Jalin Matra di atur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur. Dalam Hal ini Jalin Matra Jawa Timur dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1) Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2)

adalah program jalin matra yang menysasar pada rumah tangga hampir miskin yang berpotensi/sudah memiliki usaha yang akan diberikan pinjaman modal usaha yang akan disalurkan melalui BUMDesa.

2) Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)

adalah program jalin matra yang secara khusus menysasar kepada masyarakat miskin dengan kepala rumah tangga perempuan.

3) Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM)

adalah program jalin matra yang menysasar kepada masyarakat yang sangat miskin agar bisa meningkatkan kehidupannya.

**4. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)**

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) adalah program pemerintah Jawa Timur yang didesain khusus untuk

---

<sup>30</sup> Pedoman Umum Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2018, hal.2

mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

KRTP adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Kriteria sasaran PFK yang menyebabkan seseorang disebut sebagai KRTP antara lain :<sup>31</sup>

1. Bercerai
2. Suami meninggal
3. Ditelantarkan suami minimal 6 bulan
4. Suami difabel atau sakit menahun
5. KRTP sebatang kara usia produktif dan mampu mengelola usaha
6. Bukan sasaran penerima bantuan Jalin Matra yang lain (BRTSM, PK2) baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

Tujuan Jalin Matra PFK antara lain :<sup>32</sup>

- a) Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai mother care bagi KRTP.
- b) Memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan asset/ pendapatan keluarga
- c) Membantu mendorong ketahanan social ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar

---

<sup>31</sup> Pedoman Umum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2018, hal. 15

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 9-10

- d) Mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Prinsip Dasar Jalin Matra PFK yaitu :<sup>33</sup>

- a) Membantu dengan Hati

Program PFK adalah implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin khususnya KRTP agar dapat bertahan hidup, yang secara bertahap akan berdaya dan keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial, dan *social compassion*.

Program tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta memelihara tatanan nilai budaya setempat (*nguwongke-wong*) dengan mmberikan penghormatan pada KRTP untuk memberikan keputusan terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas agar bantuan tepat sasaran dan tepat pemanfaatan.

- b) Partisipatoris *Deliberatif*

Pengambilan keputusan di tingkat stakeholder dilakukan dengan musyawarah dan mufakat melalui “Rembug Warga” yang menjadi wahana untuk

---

<sup>33</sup> Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, <http://bapemas.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpfk>, diakses pada 8 April 2019

mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan awal kondisi KRTP sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual.

Pengambilan keputusan tentang jenis usulan kebutuhan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak bicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

c) Perspektif Gender

Fokus sasaran program PFK yaitu menempatkan KRTP sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan, dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d) Transparan dan Akuntabel

PFK dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat dan semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi.

e) Keterpaduan

Pelaksanaan PFK melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan tinggi Pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

f) Keberlanjutan

PFK merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang harus terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya sebagai upaya menjaga pelestarian program. Untuk memutus rantai kemiskinan yang dialami KRTP, dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitas untuk mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

Ruang Lingkup PFK yaitu sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Verifikasi Data KRTP
2. Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP
3. Fasilitas Bantuan KRTP
4. Peningkatan Kapasitas KRTP
5. Pemberdayaan *Mother Care*
6. Pendampingan Program

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PFK dilihat dari :

1. Tepat Sasaran

---

<sup>34</sup> Pedoman Umum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2018, hal.13-14

KRTP penerima program PFK sesuai dengan Basis Data Terpadu PPFM 2015, dan atau KRTP pengganti berdasarkan hasil verifikasi rebug warga sesuai ketentuan.

2. Tepat Jumlah

BKK kepada KRTP berupa barang sesuai daftar rincian usaha yang di susun dari hasil identifikasi usulan kebutuhan senilai Rp 2.500.000 (termasuk pajak)

3. Tepat Pemanfaatan

Barang yang sudah diterima KRTP telah digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha KRTP.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Septaningsih, melakukan Penelitian berjudul “Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan”.<sup>35</sup> Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan desa melalui pemberdayaan perempuan dan memberikan masukan alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pemberdayaan perempuan mempunyai kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi dalam budayanya, sedangkan pemberdayaan melalui pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan potensi local dapat meningkatkan motivasi untuk membentuk usaha ekonomi produktif. Melalui penyadaran lingkungan hidup, keompok mampu mengembangkan deversifikasi olahan pangan berbahan

---

<sup>35</sup>Rosalia Indriyati Septiyaningsih, *Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan*, (Jurnal seminar nasional Universitas PGRI Yogyakarta, 2015), hal 512-524

dasar lokal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini khusus membahas tentang program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dimana program tersebut dikhususkan untuk mengangkat perekonomian keluarga miskin yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan.

Mardi dan Zulkarnaini dalam penelitian yang berjudul “Program Bantuan Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat”.<sup>36</sup> Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan berdasarkan sub indikator tahap persiapan program cukup maksimal dilaksanakan. Faktor yang menghambat, yaitu faktor sosialisasi, faktor fasilitas pendukung. Dampak pelaksanaan program cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian tersebut memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti terkait program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini khusus membahas tentang pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan berkategori miskin melalui program PFK.

Utama dan Handayani melakukan penelitian yang berjudul “Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pelatihan kewirausahaan berbasis

---

<sup>36</sup> Mardi, Zulkarnaini, *Program Bantuan Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.2 Nomer 2 Maret 2014)

potensi lokal di kecamatan Wedi kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil perempuan miskin di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”<sup>37</sup>, mengukur potensi perempuan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis potensi local di Kecamatan Wedi, dan mengetahui efektifitas model Project Based Learning sebagai model pelatihan kewirausahaan berbasis potensi local di Kecamatan Wedi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan miskin di Kecamatan Wedi masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, memiliki akses pendidikan yang terbatas serta pendapatan yang rendah. Perempuan miskin di Kecamatan Wedi memiliki potensi yang tinggi dalam menjalani profesi kewirausahaan atau memiliki potensi tinggi sebagai calon enterpreneur atau wirausaha. Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan miskin di Kecamatan Wedi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan dengan menggunakan model Project Based Learning dinilai efektif dikarenakan sebagian besar peserta sukses ditinjau dari tingkat penguasaan kepribadian (jiwa) kewirausahaan dan keterampilan yang dimiliki selama memperoleh pengalaman belajar bisnis riil dengan model Project Based Learning. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini khusus membahas tentang program

---

<sup>37</sup> Agung Utama, Titin Hera widi Handayani, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*, (Jurnal Penelitian Humaniora, Vol.19 No. 2, Oktober 2014), hal. 154-167

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dimana program tersebut dikhususkan untuk mengangkat perekonomian keluarga miskin yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan.

Jannah melakukan penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Dalam Spiritualisme Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)".<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang pemberdayaan perempuan dalam spiritualitas islam, dimana sudah semestinya perempuan berani memulai memberdayakan dirinya sendiri dengan melakukan upaya-upaya revolusioner seperti memiliki manajemen waktu, menambah wawasan informasi, pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan dalam islam diberikan peran dan peluang yang sama dalam mengemban tugas kekhalifahan di muka bumi untuk mewujudkan kebaikan bersama, dan disini perempuan sudah semestinya bisa mengelola tanggung jawab yang dipikulnya semaksimal mungkin selama tidak melanggar ketentuan Allah SWT. Dalam menjalankan misi tersebut sudah semestinya perempuan mampu membentuk kepribadian dan sikap hidup yang produktif dan berkualitas sehingga bisa membawa pada kedudukan yang terhormat dan bermartabat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini khusus membahas

---

<sup>38</sup> Hasanatu Jannah, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Spiritualisme Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)*, (Jurnal KARSA, Vol.19 No.2, 2011), hal. 136-145

tentang program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dimana program tersebut dikhususkan untuk mengangkat perekonomian keluarga miskin yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan.

Kurniawati, Supriyono, dan Hanafi dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)”.<sup>39</sup> Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini khusus membahas tentang program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dimana program tersebut dikhususkan untuk mengangkat perekonomian keluarga miskin yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan.

---

<sup>39</sup> Bambang Supriyono, et.all., *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. I, No. 4)

Mawanti dan Astuti melakukan penelitian berjudul “Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif di kabupaten Karangnyar”.<sup>40</sup> Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis potensi perempuan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif, (2) menganalisis peluang perempuan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif (3) mengkaji hambatan pengembangan kewirausahaan menuju ekonomi kreatif untuk memberdayakan perempuan miskin, (4) menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan dan manfaat program penanggulangan kemiskinan bagi perempuan miskin, dan (5) merumuskan model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif. Hasil dari penelitian ini adalah Perempuan miskin di daerah perdesaan perlu diberdayakan melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif. Model yang diusulkan adalah pro-poor capacity improvement model (PCIM). Komponen utama pemberdayaan perempuan miskin adalah: (1) adanya dukungan seluruh stakeholders (baik pemerintah, swasta, LSM maupun Perguruan Tinggi) untuk melakukan program-program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender, (2) Adanya Achievement Motivation Training untuk menumbuhkan kesadaran (keberdayaan) akan pentingnya mengembangkan kewirausahaan

---

<sup>40</sup> Sri Marwanti & Ismi Dwi Astuti, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karangnyar*, (Jurnal SEPA, Vol 9 No 1, September 2012), hal 134-144

keluarga menuju ekonomi kreatif, (3) Pemantapan jejaring antar sesama perempuan miskin pelaku usaha serta pengusaha local sebagai media learning by doing, (4) Pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama atas dasar kesamaan jenis usaha, (5) Pengembangan kreativitas melalui capacity building agar produk yang dihasilkan menarik bagi pembeli dan sesuai selera pasar dan memperhitungkan potensi pasar, (6) Perluasan Sistem Bapak Angkat dengan melibatkan sebanyak mungkin usahawan lokal sehingga dapat memperkuat modal usaha dan pasar bagi perempuan miskin pelaku usaha. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini khusus membahas tentang program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dimana program tersebut dikhususkan untuk mengangkat perekonomian keluarga miskin yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan.